



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI DENGAN
DIRUT PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 17 Februari 2020
W a k t u	: 11.00 – 12.00WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Komisi XI DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A (Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Evaluasi dan Kinerja Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, MBA/F-PG):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi salam sejahtera untuk kita semua

Shalom Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam kebajikan

Yang terhormat Saudara Dirut PT. PII beserta jajarannya.

Dalam hal ini hadir Pak Wahid Sutopo Direktur Utama, kemudian Pak Salusra Satria Direktur Eksekutif Keuangan dan Proyek, Pak Doni Hamdani Deputi Direktur Keuangan dan Tanti Hidayati Deputi Direktur Bisnis.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR-RI telah dihadiri dan telah ditandatangani daftar hadir sebanyak 20 anggota, 8 Fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1), Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan *Bissmillahirrohmanirohim*, izinkan lah kami membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR-RI dengan Direktur Utama PT. PII/Persero dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Saudara Dirut PT. PII para Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Mengawali RDP hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunianya, pada hari ini kita dapat menghadiri acara RDP Komisi XI DPR RI dengan Saudara Direktur Utama PT. PII dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan kita simpulkan pada hari ini, dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Agenda RDP Komisi XI DPR-RI hari ini adalah pembahasan mengenai kinerja PT. PII Persero.

Saudara Dirut PT. PII serta Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia.

Pada Tahun 2018, PT. PII berhasil membukukan aset sebesar 10 triliun 620 miliar tumbuh 2,51% dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 10,360 miliar. Pendapatan sebesar 834 miliar tumbuh 8,92% dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 765 miliar. Dikarenakan aktivitas bisnis baru yang penjaminan non KPBU serta penyiapan proyek pendampingan transaksi.

Laba sebelum pajak penghasilan yang dibukukan PT. PII Tahun 2018, mencapai 477,46 miliar, meningkat 5,6% dibandingkan Tahun 2017 sebesar 452,14 miliar. Posisi kas dan secara kas PT. PII pada akhir tahun buku 2018 mencapai 1669,18 miliar, tumbuh 17,75% dibandingkan Tahun 2017. Model bisnis PT. PII ini dirancang untuk menjadikan proses penyediaan penjamin yang konsisten, transparan dan efisien. Penjaminan yang diberikan PT. PII disiapkan secara khusus untuk mendukung dari penanggungjawab proyek bersama dalam pengerjaan kerja bersama.

Selanjutnya PT. PII dapat menjalankan berbagai kewajiban financial PJKP yang telah dialokasikan kepada PJKP berdasarkan perjanjian KPBU. Pada kesempatan RDP pada hari, Komisi XI DPR-RI, ingin mengetahui kinerja PT. PII Persero secara komprehensif.

Selanjutnya untuk menghemat waktu, kami persilakan Direktur Utama PT. PII untuk menyampaikan paparannya.

Waktu kami persilakan.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI,
*Bismillahirrohmanirohim***

Izinkan kami untuk menyampaikan paparan mengenai kinerja PT. PII untuk Tahun 2019.

**Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati
Pimpinan serta seluruh anggota dari Komisi XI DPR-RI,**

Pertama-tama kami ucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunianya pada pagi hari ini, kita dapat bertemu pada forum yang menurut kami sangat penting ini.

Yang kedua, mewakili segenap jajaran dan Deputi PII, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi XI yang telah memberikan kesempatan kami semua untuk dapat berjumpa dan juga menyampaikan paparan pada acara RDP kita pada pagi hari menjelang siang ini.

Sebelum diawali, mohon izin kami untuk memperkenalkan tim dari PII yang saat ini hadir. Kami sendiri nama kami adalah Wahid Sutopo dan sejak Desember 2019, kami mendapat amanat untuk menjadi Direktur Utama di PT. PII. Jadi mohon arahan dan juga mohon bimbingan dari Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian di samping sebelah kiri kami, adalah Bapak Salusra Satria, sebagai Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek. Mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah familiar beliau pada kesempatan sebelumnya, karena beliau juga dari LPS Pak sebelum bergabung dengan PII Tahun 2017 yang lalu.

Kemudian di samping beliau adalah Bapak Doni Hamdani selaku Deputy Direktur yang menangani masalah keuangan dan juga inisiasi bisnis. Di sebelah kanan kami ini ada Ibu Tanti Hidayati, Beliau adalah Deputy Direktur untuk *underwriting* dan juga untuk pengembangan bisnis. Sedangkan yang samping Ibu Tanti Hidayati ada Bapak Andri Permana, selaku Eksekutif Presiden sekaligus juga ketua dari Kepala Defisi yang menangani Bidang Appraisal dan Evaluasi.

Hadir pula bersama kami jajaran dari PT. PII, mohon izin Pak, kami ajak mohon dapat kesempatan juga untuk mendengarkan langsung dari Bapak-Ibu sekalian, arahan-arahan serta bimbingan tentunya yang kami laksanakan pada kegiatan kami sehari-hari.

Bapak-Ibu sekalian,

Bila berkenan mohon izin kami akan melanjutkan dengan paparan mengenai Kinerja dari pada PT. PII. Mohon dimaklumi bahwa saat ini proses audit laporan keuangan masih berlangsung, sehingga data-data yang disampaikan berdasarkan atas laporan audit Pak. Jadi nanti Insha Allah akan nanti Bulan Maret laporan auditnya selesai, kami akan sampaikan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian laporan keuangan yang telah diaudit. Mohon dimaklumi.

Bapak-Ibu sekalian.

Izinkan kami untuk memulai laporan mengenai PT. PII. Jadi PT. PII ini adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang 100% sahamnya itu dimiliki dan juga didirikan oleh Negara RI, berdasarkan PP. Nomor 35 Tahun 2009, yang kemudian diubah dengan PP. Nomor 50 Tahun 2016. Jadi kami resmi berdiri 30 Desember 2009. Jadi awal tahun ini kami memasuki usia yang ke 10 Pak. Jadi Tahun 2020 ini kami mulai memasuki dekade kedua dari keberadaan PT. PII.

Tujuan dari PII adalah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, kemudian seluruh kegiatannya itu dibawah pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan.

Yang kami hormati Pimpinan serta seluruh Anggota dari Komisi XI DPR-RI.

Adapun mandat dari pada PT. PII, ini adalah untuk menyediakan penjaminan pemerintah dalam kerangka pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan baik dengan skema, kerja sama pemerintah dan badan usaha, ataupun dengan skema penjaminan pinjaman langsung. Di samping itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan, kami juga mendapat mandat untuk menyediakan atas dasar penugasan, pendampingan untuk penyiapan baik proyek maupun juga penyiapan transaksi untuk proyek-proyek infrastruktur.

Sampai dengan saat ini secara portofolio, kami sudah menangani 6 sektor dari infrastruktur, yaitu kelistrikan atau tenaga listrik, telekomunikasi, air minum, jalan, transportasi dan juga pariwisata. Jadi berdasarkan Perpres 38 Tahun 2015 adalah 19 sektor Pak yang dapat ditangani, terus kami sudah menangani 6 sektor. Sedangkan dari sisi proyek, ada 20 proyek KPBU dan dua penjaminan pinjaman langsung dengan total nilai proyek kurang lebih 210 triliun dan nilai penjaminan sekitar 56 triliun.

Kerangka hukum yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan kami, jadi tadi selain PT. Nomor 50 Tahun 2016, juga ada Perpres Nomor 78 Tahun 2010, mengenai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kemudian ada Perpres Nomor 38 Tahun 2015, ini mengenai kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, demikian pula ada sejumlah Peraturan Menteri Keuangan yang terkait yaitu PMK Nomor 260 Nomor 8 Tahun 2016, kemudian juga PMK Nomor 95 Tahun 2017, PMK Nomor 101 Tahun 2018, ini yang berkaitan dengan penjaminan pinjaman langsung dan PMK 73 Tahun 2018. Jadi sampai dengan akhir Tahun 2019, ada kurang lebih 11 triliun yang sudah diperoleh oleh PT. PII ini.

Adapun mengenai penyertaan modal negara di PT. PII. Jadi sampai dengan akhir Tahun 2019, itu dari modal dasar 9 triliun sudah ada kurang lebih 8 triliun yang disetorkan secara bertahap. Bagaimana yang tertera di slide di atas ini Pak. Sejak Tahun 2009 sampai dengan terakhir Tahun 2017. Dengan total dengan nilai PMN sebesar 8 triliun. Jadi penyertaan dalam hal ini, kami juga sudah dapat membukukan saldo, laba sebesar 3 triliun sampai dengan akhir Tahun 2019. Hingga total ekuitas dibekukan sebesar 11 triliun sampai dengan akhir Tahun 2019.

Pilar dari pada bisnis PT. PII ini, ini ada 4 hal Pak. Jadi yang pertama adalah dari aspek penjaminan untuk kerja sama pemerintah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, ada 19 sektor yang dapat diselenggarakan dengan skema KPBU. Di sini peran PU adalah sebagai penyedia tunggal atau *single windows* untuk penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur dengan skema KPBU ini, dengan tujuan untuk meningkatkan *bank capability* dari pada proyek. Kami juga melaksanakan pemantauan dari pada resiko proyek setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama pemerintah badan usaha dan manakalah terjadi adanya klaim, akan bertindak juga sebagai asesor dari pada klaim.

Yang kedua adalah penjaminan pinjaman langsung. Ini memang terkait dengan instrumen pembiayaan infrastruktur yang diperlukan oleh BUMN dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Ini masih sangat baru Pak, jadi dengan PMK 101 Tahun 2018, disini kami juga melakukan pemantauan adanya resiko gagal bayar dari pada korporasi apabila mendapatkan skema ini. Jadi ini disebutkan utama untuk pembiayaan yang berasal dari Lembaga Keuangan Internasional atau LKI.

Yang ketiga adalah dari aspek penyiapan proyek dan pendampingan transaksi berkaitannya dengan PMK 73 Tahun 2018. Sebagai bagian dari dukungan pemerintah pada proses pengembangan infrastruktur dengan skema KPBU, itu Kementerian Keuangan juga menyediakan fasilitas yang dinamakan *project development facility*, yang ditujukan untuk membantu penanggungjawab kerja sama dalam menyiapkan dokumentasi dari pada proyek, sehingga memenuhi *bank capability* dari pada calon investor. Kementerian Keuangan

dapat memberikan penugasan kepada BUMN, diantaranya kepada PII, untuk dapat melakukan penyiapan proyek maupun pendampingan pada proses transaksinya sendiri.

Yang keempat adalah aspek.....

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Karena pengembangan infrastruktur ini terutama dengan menggunakan skema dari KPBU, itu memerlukan kapasitas dari pada pelaksanaannya. Karena itu di PT. PII kami memiliki yang namanya institute Pak *Indonesian infrastructure (rekaman tidak jelas) institute* yang bekerja sama juga dengan perguruan-perguruan tinggi melaku skema UNFID (*University Network For Indonesia Infrastructure Development*) ini melakukan berbagai kegiatan kapasitas *building* juga didukung oleh kantor bersama yang didengarnya ada perwakilan dari instansi Pak. Jadi ada kegiatan center yang kami bangun untuk pembangunan infrastruktur ini.

Kemudian juga dukungan juga standarisasi kompetensi KPBU, kegiatan-kegiatan penelitian termasuk juga penerbitan jumlah ilmiah, serta upaya untuk *out right* kepada pihak-pihak yang terkait.

Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh anggota dari Komisi XI DPR-RI.

Untuk berikutnya izinkan kami menyampaikan mengenai Kinerja Keuangan dari PT. PII ini dalam tahun terakhir. Jadi atas bimbingan dan arahan dari Bapak-Ibu sekalian, kami dapat menunjukkan adanya kinerja keuangan yang cukup baik dan bertumbuh sejak Tahun 2014-2019. Hal ini juga ditandai setelah adanya efektivitas dari penjaminan KPBU pertama, yaitu untuk proyek pembangkit listrik Batang Pak, di Jawa Tengah, dua kali 1.000 Megawatt, sehingga efektif di Tahun 2016. Jadi dengan adanya pertumbuhan yang baik ini, di Tahun 2014, kami membukukan pendapatan usaha sekitar 530 miliar dengan laba bersih sekitar 346 miliar sampai dengan di Tahun 2019 ini secara *on audited* kami sudah membukukan pendapatan usaha secara kurang lebih 1 triliun dengan laba bersih lebih kurang 530 miliar. Ini laporan yang bersifat *on audited*, mudah-mudahan setelah audit tidak akan banyak perubahan, nanti akan kami sampaikan juga kepada Bapak-Ibu sekalian.

Demikian pula secara *rating*, saat ini juga kami dilakukan *rating* oleh lembaga pemerintah internasional, yaitu rating, ada dua versi dari rating ini, yaitu yang versi domestik, itu dengan hasil rating a, a, a, kemudian untuk yang internasional dengan hasil rating iii, dengan objek yang sifatnya stabil. Ini mudah-mudahan menunjukkan bagaimana Bapak-Ibu sekalian dapat membimbing kami dalam memberikan kinerja keuangan yang stabil dan tertumbuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR-RI.

Berikutnya mohon izin untuk menyampaikan mengenai status penjaminan proyek infrastruktur sampai dengan diakhir Tahun 2019. Jadi sampai dengan akhir Tahun 2019, ada 22 proyek yang mendapatkan fasilitas penjaminan dari pada TP. PII dan bersyukur *alhamdulillah*, cukup merata Pak di seluruh wilayah Indonesia. Total nilai proyek yang masuk dalam skop proyek-proyek KPBU, KPBU yang mendapatkan penjaminan PT. PII, totalnya adalah 210 triliun yang terdiri dari 6 sektor yang berbeda. Ini kami harapkan memang dapat turut membantu proses pembangunan infrastruktur terutama di RPJMN 2014-2019 yang lalu.

Dari sisi kemanfaatan Pak, jadi berdasarkan dengan PMN yang telah diberikan sejumlah 8 triliun, ini puji syukur *alhamdulillah*, kami dapat mendukung proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar 202 triliun, artinya ada ratio sebesar 26 kali antara PMN dengan proyek-proyek yang dapat didukung pelaksanaannya. Sedangkan dari segi sektornya ini cukup beragam, baik dari sektor pariwisata, transportasi, telekomunikasi dan informatika, tenaga listrik, sektor jalan dan juga sektor air minum. Mudah-mudahan ini menunjukkan adanya faktor pengalih dari PMN yang telah diberikan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang menjadi rencana dari pada pemerintah.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR-RI.

Untuk selanjutnya di Tahun 2020 ini, ini direncanakan ada lagi 9 proyek tambahan, yang akan menjadi skop dari pada kegiatan kami. Ini sebagai tambahan dari 22 proyek yang tadi sudah disebutkan, yaitu tersebar disektor transportasi, kemudian di energy terbarukan, sektor jalan, air minum maupun kesehatan. Satu diantara proyek-proyek ini, yaitu untuk Bandara Komodo Labuan Bajo, itu *alhamdulillah* sudah ditandatangani kesepakatannya dua minggu yang lalu antara Kementerian Perhubungan, kemudian juga investor dan juga PII. Sedangkan yang lainnya disaat ini masih berlangsung proses penyehatan maupun transaksinya. Ini diharapkan dengan kegiatan ini diakhir tahun akan proyek yang sudah menjadi skop dalam PII dengan nilai proyek sebesar 233 triliun. Tentunya ini semua akan tergantung dari progres yang dapat diberikan oleh masing-masing penanggung jawab kerja sama dan tentunya juga sambutan dari pada calon investor terhadap proyek-proyek yang akan ditawarkan oleh Pemerintah. Dan rencana tersebut, maka diharapkan, maka di akhir Tahun 2020, dari sisi rasio pemanfaatan PMN, itu akan meningkat menjadi 26 kali, dengan nilai proyek investasi sekitar 233 triliun. Ini juga diharapkan ada lagi tambahan sektor baru yang akan masuk dalam skema yang dijamin oleh PT. PII ini. Ini mudah-mudahan akan meningkatkan pemanfaatan dari program-program PT. PII, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Bapak-Ibu sekalian.

Apakah sebuah proyek itu dapat mendapatkan fasilitas penjaminan dari PT. PII adalah dampak ekonomi dan sosial. Ini merupakan elemen yang menjadi pertimbangan pada saat proses skrining maupun proses evaluasi dari pada PT. PII. Ini juga menjadi objek yang mendapatkan perhatian yang cukup intensif dari PT. PII, baik dari defisi, parameter sosial maupun juga kegiatan yang dilakukan IIGF Institute dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga riset yang cukup kredibel seperti LPEM di UI maupun juga Pustral UGM.

Jadi berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan dapat ditunjukkan adanya dampak ekonomi dari kegiatan yang dijamin oleh PT. PII ini untuk masing-masing sektor. Jadi disektor jalan Tol, setktor Telekomunikasi, disektor Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM, Sektor Perkereta Apian juga disektor Tenaga Listrik. Ini dampaknya baik pada pertumbuhan ekonomi maupun juga pembukaan lapangan kerja. Ini yang diharapkan juga menjadi satu hasil dari PMN yang diberikan maupun skema dan team work yang dikembangkan PII, serta kemanfaatannya kepada masyarakat.

Yang kami hormati Pimpinan serta seluruh anggota Komisi XI DPR RI

Aspek lain yang mendapatkan perhatian yang cukup mendalam dari PT. PII adalah upaya untuk melakukan pengelolaan resiko maupun tatakelola perusahaan yang baik. Jadi secara internal itu ada yang sudah juga dikembangkan dalam upaya ini untuk mengelola manajemen resiko maupun tatakelola, baik dari aspek pengawasan oleh Kementerian Keuangan yang intensif karena diatur PMK tersendiri yaitu PMK 95 Tahun 2017, baik dari aspek pengendalian kewajiban kontijensi maupun pengelolaan resiko serta laporan manajemen dan investasi.

Kemudian juga secara eksternal dilakukan pengawasan, baik oleh ekstrenal auditor maupun secara rutin adanya audit BCG yang dilakukan oleh BPKP. Yang alhamdulillah hasilnya sampai dengan saat ini menunjukkan hasil yang sangat baik menurut kriteria yang dibuat oleh BPKP. Setelah internal kami juga mulai menerapkan pengawasan internal maupun juga aspek pengelolaan manajemen resiko, baik dari sisi proyek maupun disisi interprise risk manajemen. Ini harapannya juga didukung oleh standar yang bersifat internasional maupun juga kerangka dari proses atau penilaian atau dari pada proyek.

Bapak-Ibu Pimpinan serta seluruh anggota Komisi XI DPR-RI yang kami hormati.

Dengan Puji Syukur juga *alhamdulillah* upaya ini menunjukkan mendapatkan perhatian baik dari sisi domestik maupun internasional. Jadi didomestik, PT.PII memperoleh salah satu juara untuk *Annual Report Award*, yang diselenggarakan oleh Komite Nasional untuk *Corporate Good Governance*, dan secara internasional sebagai bagian dari *Asean Risk*

Award, di Tahun 2019, itu PT.PII juga mendapatkan tiga penghargaan, baik untuk *Best Public Iniatif*, *Best Publik Risk*, maupun risk pada ajang *Asean Risk Award*, yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan di Asean. Ini sekali lagi terima kasih untuk segala bimbingan, arahan dari Bapak-Ibu sekalian atas pencapaian ini.

Disamping kegiatan-kegiatan tadi, PT. PII juga melaksanakan kegiatan dibawah IIGF institute dalam bentuk kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi. Jadi pada saat ini sudah ada MOU dengan 32 perguruan tinggi nasional dalam upaya pengembangan kapasitas, kajian-kajian KPBU dalam format *universitas network indonesia infrastructure development* atau UNIID. Seperti yang terlihat cukup tersebar distribusi dari perguruan tinggi yang bekerjasama. Saat ini yang menjadi koordinator adalah Universitas Padjajaran dan ini secara bergilir dilakukan pergantian diantara pihak-pihak terkait. Ini diharapkan juga dapat membantu penyebaran dari konsep KPBU maupun upaya peningkatan kualitas dari pengembangan infrastruktur, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Selain itu kami juga secara aktif melaksanakan kegiatan kapasitas building maupun desiminasi dari hasil penelitian. Jadi untuk kapasitas building kami melakukannya bekerja sama dengan banyak pihak, antara lain dengan kantor bersama KPBU yang yang di dalamnya itu ada 7 instansi, yaitu Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, kemudian ada juga Kementerian Dalam Negeri, BKPM, LKPP dan juga PT. II sendiri. Kami juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak di daerah dalam melaksanakan kegiatan kapasitas building ini, ada kapasitas yang kami siapkan di kantor kami, untuk melaksanakan kegiatan ini maupun juga di lokasi lain yang disediakan oleh mitra-mitra kami.

Dalam upaya juga untuk meningkatkan dari pada sumber daya manusia, PT. PII juga sudah mendapatkan kualitas dari pada Sumber Daya Manusia. PT. PII juga sudah mendapatkan sertifikasi sebagai ATO atau *Authorized Training Organization*, dari EPMJ. EPMJ ini sebuah lembaga yang mendapatkan mandat dari *world bank* dan juga dari ADB untuk melakukan desiminasi mengenai secara global. Jadi kami sudah mendapatkan sertifikasi itu dan PT. PII dapat melakukan pelatihan maupun menerbitkan sertifikasi untuk ini di Indonesia, sebagai satuan lembaga yang diertifikasi di lndonesia.

Dari sisi penyebaran diseminasi pengetahuan, ada beberapa karena yang digunakan baik yang sifanya itu adalah canal secara forum, secara rutin kami melakukan kegiatan indonesia *infrastructure roundtable* secara berkeliling di daerah-daerah, kami juga ada websiter. Jadi secara digital online, itu dilakukan juga disiminasi mengenai jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim kami di institute. Ini ditujukan kami juga membawa beberapa contoh dari Jurnal maupun hasil kompedium dari kegiatan-kegiatan penelitian ini bersama dengan perguruan tinggi.

Yang kami hormati pimpinan serta seluruh anggota dari Komisi XI.

Demikian yang dapat kami sampaikan paparan mengenai kegiatan dan kinerja PT. PII.

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas segala bimbingan, arahan yang telah diberikan dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan untuk keagenda berikutnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampai kepada Pak Wahid Sutopo, Direktur Utama PT. PII, yang telah memberikan paparan.

Mungkin dari Direksi yang lain ingin menambahkan, silakan.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Sementara cukup.

KETUA RAPAT:

Cukup, oke.

Baik, di meja Pimpinan sudah ada beberapa penanya, dari kiri Ibu Linda Megawati silakan.

F-PD (LINDA MEGAWATI, SE.,M. Si.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
di sini juga ada dari PII beserta jajarannya yang saya hormati.**

Terima kasih atas pemaparannya.

Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Salah satunya yaitu sejak didirikannya pada Tahun 2009 ya PII itu. Sejauh mana PT. PII mampu melaksanakan tujuan utama pendirian, yaitu Satu, menyediakan penjaminan untuk proyek *public private partnership infrastructure* di Indonesia. Dua, meningkatkan kelayakan kredit, terutama bank capability dari proyek public, proyek partnership di mata investor atau kreditor, dan Tiga, meningkatkan tatakelola dan proses yang transparan dalam penyediaan penjaminan dan meminimalkannya kemungkinan terhadap APBN dan kewajiban kontingensi pemerintah.

Terus pertanyaannya Pak, sejauh mana keberhasilan PT. PII dalam minat inferstor untuk berinvestasi kedalam pembangunan infrastruktur, melalui peningkatan kelayakan kredit dan juga proses mitigasi resiko dari proyek

infrastruktur tersebut. Terus yang kedua, seperti profil resiko yang diberikan penjaminan oleh PT. PII mengenai lisensi, izin dan persetujuan, keterlambatan atau kegagalan financial, perubahan regulasi dan perundangan, wanprestasi, integrasi dengan jaringan resiko, fasilitas, pesaing, resiko pendapatan, resiko permintaan, resiko harga, resiko eksplorasi, resiko tidak dapat dilakukannya konvensi dan transfer mata uang, resiko dan..... jadi di sini Pak pertanyaannya ya. Menurut PII, pada perolehan anggaran pengembangan infrastruktur dari 2 skema KPBU dengan penjaminan pinjaman langsung, manakah yang lebih menguntungkan dan lebih cepat membantu dalam proyek pengembangan infrastruktur.

Yang terakhir yaitu saya sangat apresiasi, untuk PT. PII dimana *Asean Risk Award* Tahun 2019, meraih juara I dalam tiga kategori yaitu kategori publik rate, publik inisiatif dan risk iducator. Apa upaya PT. PII dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, agar tidak kalah saing dengan perusahaan penjaminan infrastruktur lainnya, karena mempertahankan pada umumnya lebih sulit dari pada memperoleh target.

Mungkin itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

WAKATUA (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S./F-PDIP):

Baik, terima kasih Ibu Linda Megawati.

Pak Dirut, baru pagi ini saya lihat Ibu Linda Megawati datang lebih dulu, saya tahu kenapa, betul, biasanya terakhir datangnya, kurang lebih seperti Pak Heri Gunawan, tapi kali ini paling pertama tadi, saya belum datang, beliau sudah ada di tempat. Terima kasih Ibu Linda Megawati permintaannya ke Jawa Tengah sudah diakomodir. Jadi banyak sekali permintaannya Ibu Linda mengawali pagi hari ini.

Baik, kemudian yang terhormat sebelum Pak Heri Gunawan masih berfikir-fikir, Pak Sihar Sitorus kami berikan waktu dan kesempatan.

Silakan yang terhormat.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan Komisi XI yang saya hormati.

Selamat pagi kepada Direksi Utama dari PT. PII, Penjaminan Infrastruktur Indonesia beserta jajarannya.

Sebelumnya perkenalkan nama saya, Sihar Sitorus, Nomor Anggota A-139 dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang meliputi 19 kota/kabupaten, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena panjang.

Jadi ini Pak Eriko ini sangat baik sekali pagi pagi hari ini, saya dikasih kesempatan pertama kali, makanya saya *shock* mau bertanya ini.

Baiklah Pak, kurang lebih saya mencoba menangkap yang Bapak persentasikan baru saja. Mungkin pertanyaan saya lebih untuk membantu saya untuk memahami apa sih PII ini. Di dalam memberikan penjaminan ini Pak, kalau kita melihat dari rasio total nilai proyek dan nilai penjaminan, sekitar 25%, apakah ini mengindikasikan adanya konsorsium bersama-sama penjamin lainnya, ataukah ini hanya menjamin sisi pemerintah, ataukah ini juga untuk proyek itu. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, mungkin ini agak tentang total equity yang 11 triliun itu Pak, 8 modal disetor, 3 triliun itu belum dikatakan, mohon interaktif. 3 triliun ini adalah *dividen fee out* atau hanyalah laba ditahan.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Laba ditahan Pak.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Laba ditahan.

Kala kita lihat tadi Pak dipersentasi Bapak, ada 6 sektor yang menjadi portopolio dari pada PII, tentunya mereka mempunyai *riks profile* yang berbeda-beda. Ini bisa Pak nanti dalam jawaban tertulis mungkin atau dalam kesempatan pagi ini, waktu memungkinkan memberikan *risk profile* dari pada masing-masing sektor ini, karena kalau tidak salah tangkap ini, yang dimaksud rasio ini tentunya dari pada siproyek tersebut ya Pak ya. Nah in kita bisa lihat di elektrisiteit dan road ini *risk taking*, Bapak mengambil peran satu proyek yang mengambil dengan yang tinggi, tentunya di rasionya juga tinggi, resikonya tinggi. Nah ini mungkin apakah ada *cash flow* analisis yang juga ditampilkan Pak, *rate of returnnya*, sehingga kita ingin melihat, apakah apabila terjadi suatu kegagalan dalam proyek ini, bahwa PII mempunyai kemampuan untuk *cover losses* yang terjadi andaikata. Dan mungkin juga kalau boleh ada cerita gagalnya Pak, ditampilkan kalau kita misalnya sukses, kita semuanya *happy* ya, tapi kalau kita ada cerita yang hampir-hampir gagal atau bahkan sudah gagal, kalau ada mungkin kita bisa tampil supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut.

Demikian juga di 2020 rasionya agak tinggi, memang di sananya mungkin dari pada bisnisnya seperti itu, namun dengan 25% ke 35% penjaminan tadi, apakah itu memadai untuk mengcover bisnis sektor yang cukup tinggi.

Kemudian, tadi kalau bicara pendapatan Pak di slide yang sebelumnya, kira-kira sumber pendapatannya ini apakah rates, tentunya menggunakan rates, ratesnya ini variabel apakah fix ataukah subjek to risk profile dari pada sektor itu sendiri.

Saya pikir itu dari saya pimpinan.

Terima kasih.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Sihar yang terhormat.
Selanjutnya sebelah kiri, Pak Hidayatullah.
Silakan Pak.

F-PKS (HIDAYATULLAH, SE.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI
Bapak-bapak dan Ibu dari Dewan Direksi, PT. PII**

Melengkapi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan sebelumnya, bahwa kami mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan kinerja keuangannya, tapi memang kebiasaan kita di sini Pak, kalau kita menerima paparan dari mitra kerja selalu menggambarkan keberhasilan. Jadi kita ingin dalam penyampaian itu juga seimbang dengan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Pak Sihar tadi, sehingga kita bisa terus menjaga kinerja keuangan BUMN-BUMN kita tetap dalam keadaan baik.

Banyak tadi yang dijamin yang masuk dalam penjaminan PT. PII ini. Mungkin bisa dilihat disampaikan ke kami dari semua yang dijamin itu, kira-kira apakah semua sudah sesuai dengan apakah yang diharapkan dari awal. Kemudian apa-apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi penjaminan ini terkait dengan resiko yang akan diterima, apakah ada faktor-faktor eksternal misalnya, sehingga bisa menyebabkan nanti kita membayar *claim* mengganggu kinerja keuangan.

Kemudian yang berikutnya yang sekarang lagi hangat-hangatnya, terkait masalah pengelolaan dana. Ini juga nanti mohon dijelaskan, karena sebagian dana-dana yang dikelola itu juga ditempatkan di Reksadana. Seperti apa kondisinya terkait dengan misalnya ada 800 rekening dari manajer investasi yang dibekukan, apakah ada kaitannya, biar kita tahu.

Kemudian ada catatan keuangan 3 triliun, bagaimana hubungannya dengan pemerintah terkait permintaan mungkin kalau di satu sisi kita mendapatkan penyertaan modal, tapi disisi lain mungkin pemerintah ingin mendapatkan keuntungan itu, devidennya ditarik ke pemerintah. Sudah sampai sejauh mana hubungan tersebut.

Saya kira untuk pertama itu dulu.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Hidayatullah.
Sebelah kanan, Pak Elnino.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M. Si.):

Baik.
Terima kasih Pimpinan.

**Pak Pimpinan dan para Anggota yang terhormat
Pak Direksi PT. PII, Pak Sutopo**

Ini benar-benar bertanya Pak, karena memang kita ini dengar PII baru ini. Saya sempat *searching* di internet juga berita tentang PII sangat minim, artinya apakah PII ini memang tidak populer atau memang sengaja, bersembunyi juga kita tahu persis. Tapi beberapa pertanyaan saya, kira-kira begini Pak. Yang pertama adalah apakah semua project-project yang dijamin oleh PII, adalah project yang diperoleh atau dilaksanakan oleh orang Indonesia, oleh perusahaan milik orang Indonesia. Jangan sampai misalnya dari beberapa project itu malah perusahaan asing yang Bapak jamin, mengapa juga kita simpan APBN di situ kalau Bapak menjamin perusahaan asing. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi ada persentasi tentang laba PII ada berapa. Itu larinya kemana Pak. Persentasi-persentasi mungkin ke negara berapa, ke arah mana itu, terus berapa persen jadi apa?

Yang ketiga, oh, iya saya ini, karena lokal Pak, saya Wakil dari Gorontalo, nama saya Elnino Partai Gerindra. Saya di Gorontalo itu ada skema KBPU yang untuk pembangunan rumah sakit di sana, apakah itu juga sudah diproses oleh PII atau mungkin diproses oleh perusahaan yang lain perusahaan penjaminan yang lain atau bagaimana? Kalau memang ada di PII, kami mohon informasinya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Elnino.
Selanjutnya Pak Kamrussamad.

F-P GERINDRA (H. KAMRUSSAMAD):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

**Pak Dirut dan seluruh jajaran PII yang kami hormati,
Selamat Pagi salam sejahtera untuk kita semua.**

Pertama-tama di paper presentasi Bapak ini, telah menyampaikan beberapa project yang dicover dalam program penjaminan, salah satunya adalah pembangunan Kereta Api Ruas Makasar Pare-pare. Ini pembangunan ini sudah berlangsung kurang lebih 4 Tahun Pak, dan tidak ada progres signifikan sampai sekarang. Sebagai sebuah lembaga penjaminan project, bagaimana Bapak melihat kelayakan proyek ini dan *benefit* apa yang sampai saat ini Bapak dapatkan dari proyek yang tidak ada kepastian sampai bisa dituntaskan?

Yang kedua, kami minta uraian lebih detail, tentang project-project yang Bapak jamin hydropower program yang ada di wilayah Sulawesi. Karena saya agak khawatir pemain kelistrikan di Sulawesi ini tidak banyak, saya khawatir ada unsur monopoli disitu, apalagi yang dominasi di sana pernah menjadi Presiden, ini harus kita periksa baik-baik, mendalam karena jangan sampai BUMN ini bukannya pro terhadap dunia usaha, tetapi pro terhadap koporasi yang memang punya akses kekuasaan. Ini yang harus kita jaga ya. Jadi mohon datanya didetailkan Pak, biar kita cocokkan nanti barang itu ya, Pak Elnino ya.

Yang ketiga, Bapak mungkin perlu juga membaca PP Nomor 12 Tahun 1998, tentang Tugas Fungsi BUMN Persero. Di sana setiap BUMN, diharapkan aktif membangun, membimbing dan memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah. Nah di dalam paper Bapak, mungkin selama sejak berdiri atau setidaknya walaupun Bapak baru masuk PII sebagai Dirut dan Tim, tentu sudah bisa mendapatkan *update*. 11 Tahun usia PII ini, apakah kontribusi dalam pengembangan *small medium enterprise* ini, sehingga BUMN sebagai lokomotif dalam pembangunan ekonomi nasional, juga memiliki andil dalam menciptakan kelas menengah baru di bidang *entrepreneur*. Itu yang kita perlukan.

Selanjutnya Pak, juga minta penjelasan tentang 5 Tahun ini banyak sekali teman-teman pengusaha di sektor kontraktor yang mengambil sub kon di BUMN Karya-karya dalam project infrastruktur jalan misalnya, ditanyak ruas Binjai, kemudian di Riau dan banyak lagi ruas-ruas kemudian marginnya itu sangat kecil. Nah posisi PII itu menjamin dimana? Apakah termasuk sub kon itu bisa dijangkau sebagai penjamin proyek ini? Karena sumbernya dari BUMN karya-karya yang selama 5 Tahun ini, itu dimonopoli atau didominasi oleh mereka, sehingga sektor pengusaha kontraktor kita yang di daerah-daerah banyak menjerit Pak, karena dikontrak pertiga bulan misalnya dibayar, ternyata realisasinya 6 bulan. Kalau dikontrak 6 bulan, realisasinya 9 sampai 12 bulan. Nah posisi PII ini seperti apa mengcover ini, karena mereka ini adalah pelaku usaha di daerah-daerah yang cukup signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal Pak.

Kemudian selanjutnya di sektor perbandingan Pak, perbandingan antara alokasi penjaminan Bapak di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan, di wilayah Sulawesi dan di Pulau Jawa. Kenapa hal ini kami tanyakan? karena kita ingin mendorong percepatan daerah-daerah tertinggal Pak. Jadi apakah skema yang diberlakukan sama dengan skema yang secara ekonomi, secara

infrastruktur itu sama dengan daerah-daerah terpencil. Ini yang kadang-kadang perlu mendapatkan *update* Pak, karena kalau tidak kita agak sulit nanti untuk juga mendorong partisipasi pengusaha-pengusaha lokal.

Kemudian yang terakhir, yang kami harapkan dari Bapak itu adalah..... (suara terputus)... lebih detailnya karena pengalaman kita misalnya investasi Asurani Jiwasraya di beberapa di pasar modal lalu kemudian itu di sektor swasta, ternyata kemudian menjadi misalnya menjadi masalah. Nah kita juga ingin mendapatkan supaya jangan sampai PII ke depan justeru sekarang sehat, tetapi karena ada kebijakan yang tidak prudent misalnya kita mesti harus memetakan lebih awal dan arah kebijakannya, apakah ada arah kebijakan tingkat presentase misalnya penjaminan proyek pemerintah dengan swasta dengan alasan-alasan tertentu.

Mohon penjelasan Pak Dirut.

Terima kasih Pimpinan.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Pak Kamrussamad terima kasih.

Berikut Ibu Puteri.

Silakan Puteri.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang semuanya.

**Izin Pimpinan, anggota Komisi XI yang terhormat,
Bapak Dirut PII beserta jajaran,**

Saya Puteri Komaruddin dari Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, meliputi kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bekasi.

Izin untuk menyampaikan beberapa komentar.

Pertama terkait dengan bahan presentasi yang sudah disiapkan. Di sini saya belum melihat paparan terkait dengan pembagian pengusul proyek dari pemerintah maupun badan usaha. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dalam jawaban tertulis yang akan disampaikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, pelaksanaan kerja sama bersama dengan Pemerintah, Badan Usaha atau KPBU, dalam penyediaan infrastruktur daerah dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tadi sudah Bapak sampaikan juga. Kurangnya pemahaman Pemda dan kapasitas SDM terkait skema tersebut. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua Pemda memiliki kapasitas riskal yang mencukupi pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jadi pertanyaannya, yang pertama adalah langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh PII agar terus mendorong peran dan

Keterlibatan Pemda dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadikan Bapak sudah menjelaskan terkait dengan *capacity building* dan strategi yang sedang dilakukan oleh PII dan sejauh apa dampak *capacity building* itu sendiri dalam meningkatkan partisipasi Pemda dalam kontribusinya untuk skema KPBU tersebut. Itu pertanyaan yang kedua.

Ketiga, terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Jadi Bappenas menjelaskan kepada kami bahwa pemindahan Ibu Kota membutuhkan dana sekitar 486 triliun, jumlah yang memang tidak sedikit itu. Dalam skema APBN KPBU dan Swasta, dari total pembiayaan tersebut, porsi terbesar yang melalui skema KPBU sekitar 265,2 triliun atau 54,6% dari total perkiraan kebutuhan. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif serta membangun infrastruktur utama selain yang tercakup dalam APBN. Jadi pertanyaannya, apakah PII sendiri sudah melakukan kajian terkait dengan jenis infrastruktur yang layak diberikan fasilitas penjaminan pada KPBU infrastruktur di Ibu Kota Negara?

Yang kedua, sejauh apakah perkiraan kesanggupan PT. PII dalam memberikan jaminan atas proyek infrastruktur melalui skema KPBU di Ibu Kota Negara kita yang baru. Dan yang ketiga, sebagai salah satu..... sejauh apa langkah yang dilakukan PT. PII dalam menarik dalam partisipasi investor dalam proyek KPBU di Ibu Kota Negara yang baru nanti.

Sekian pertanyaan dari saya,

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Waalaiikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh

Ibu Puteri terima kasih.

Berikut Pak Rudi.

Setalah Pak Rudi, Pak Heri Gunawan yang terhormat.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua, seluruh anggota dan jajaran Direksi PT. PII.

Tapi saya yang lain-lain belum pada kenal, Ibu ini Direksi juga, Ibu yang rambutnya pirang, ini sepertinya Belanda.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Izin Pimpinan.
Mungkin Ibu Tati bisa memperkenalkan diri.
Silakan Ibu Tati.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Interaktif sedikit Pimpinan.

DEPUTI DIREKTUR DIREKTORAT BISNIS PAJAK (TATI HIDAYATI):

Terima kasih Pak.

Mohon izin, nama saya Tanti Hidayati, di sini jabatan saya sebagai
Deputi Direktur untuk Direktorat Bisnis Pak.
Terima kasih.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Jadi yang ini Bapak ini, Direktur juga Pak.

DEPUTI PROJECT (ANDRE PERNAMA):

Terima kasih Pak.
Saya Andre Pernama Pak. Saya Deputi Project Appraisal.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Di sana semua Direksi semua.

DEPUTI DIREKTUR KEUANGAN (DONNY HAMDANI):

Izin.
Saya Donny Hamdani, saya Deputi Direktur Keuangan Pak.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Satu lagi Pak.

SAMSA:

Mohon izin Pak Rudi.
Saya salah satu Direktur juga Pak.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Ini direktur semua ini, top.
Berarti gajinya besar kalau direktur Pak, iya kan?

Baik Pak.

Pak Wahid, jadi saya dulu kenal sebelum Pak Wahid, namanya Pak Arman ya Pak ya. Pak Arman Direktur yang lama, dulu jajarannya sudah berganti semua. Ini saya ingin mengasih masukan kepada PII Pak. PII ini ada konses bisnisnya ini diberi mandat ini memberi penjaminan ya Pak. Berarti sama, sama asuransi ya, beda tidak, sama ya, penjaminan. Jadi saya ingin mengasih masukan ini, saya tidak mau bertanya, tidak mengkritik. Mengasih masukan supaya bagaimana PII tetap bagus, tetapi labanya lebih dari 3 triliun Pak. Jadi Pak Wahid dan seluruh jajaran, saya saran Bapak dan Ibu dan seluruh Direksi, kalau bisa konsentrasi kepada mandat yang diberikan ini Pak. Mandatnya ini kan untuk infrastruktur skema kerja sama pemerintah. Nah itu Pak kuncinya. Artinya proyek pemerintah, Bapak membuat *agreement* sesama Pak, sesama kita yang ada anggarannya Pak, tidak akan lari, artinya ini perusahaan untung begitu. Bukan begitu Pak Wahid? Jadi jangan nanti lari, Bapak tergiur.

Ada ini inovasi misal Bapak bilang perseroan, kita ke swasta misalnya mengambil kebijakan Bapak dengan direksi, kita kasih coba ke swasta misalnya, namanya Dunia Tech misalnya. Selesai Pak, duit Bapak yang 3 triliun itu begitu. Nah itu. Jadi saya mengingatkan konsentrasi pada mandat yang diberikan oleh yang memberikan ini Ibu Sri Mulyani ya Pak ya, kan di bawah Kementerian Keuangan dan portofolionya ini kan di sektor listrik, telekom, jalan, transport juga kebanyakan BUMN-BUMD ya Pak ya, BUMN, Pemda. Jadi sesama lingkaran APBN dan APBD itu Pak. Nah itu yang saya ingatkan supaya jangan lari Pak, kalau lari nanti dari mandatnya pasti kejadian yang Bapak kita dengar belakangan ini semua begitu.

Tapi saya percaya yang di bawah Kementerian Keuangan ini, ada PII, ada PIP, ada SMI, saya lihat masih baik mengelola keuangannya Pak, tapi yang ekstrim saya melihat agak sekarang melenceng dan NPL nya tinggi begitu. Jadi saya ingin mengingatkan supaya jangan lari Pak, pertahankan dan ini pasti bisa lebih besar lagi dari laba yang Bapak yang bilang sekarang membukukan 3 triliun. Tentunya 2020-2021 tambahkan kan Pak dari yang dijamin kemarin. Tapi nanti jangan Bapak membeli saham ini, sahamnya seperti model-model itu jangan Pak, ribut kita di sini begitu. Nah itu. Maksudnya Bapak jangan tergiur begitu, jalankan, lurus Pak, gaji sudah besar, fasilitas sudah banyak, tenang hidup Pak, nyaman, ada waktu jalan-jalan keluar negeri, kan begitu Pak. Jadi itu tenang. BUMN ada juga boss begitu. Itu Pak dan pilar-pilar pertahankan semua Pak.

Itu saya pikir Pak yang utama Pak, selamat bekerja Pak, baik-baik, jangan larilah Pak pokoknya Pak, pikiran itu jangan mau cepat kaya, cepat kita raup yang ada, jangan Pak.

Itu ketua saya kembalikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Rudi.

Selanjutnya Pak Heri Gunawan yang terhormat.

Silakan Pak.

F-P GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati,
Pak Wahid Sutopo beserta jajaran yang saya hormati,**

Kalau kita mendengar PII, rasanya baru dua periode ini Pak, saya baru pertama kali ini melakukan rapat dengan PII, padahal di satu sisi PII ini, sejak Tahun 2009 didirikan, bahkan PMN pun diberikan dari Tahun 2009, BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan, pertama kali kita melakukan rapat.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas makanan kopi serta minuman yang disajikan Pak.

Yang pasti ini didirikan Tahun 2009. Tahun berlanjut saya lihat disini diberikan PMN, penyertaan-penyertaan. Namun PII nampak mulai *in charge* di Tahun 2014, kenapa saya berbicara seperti itu, 2009 ini didirikan oleh Sri Mulyani, 2014 ini Sri Mulyani mendorong kembali. Semuanya pasti akan berbicara *second layer contingency*. Oke, sebelum itu terjadi, saya ingin melihat Pak. Di *slide 6* yang disajikan di sini, PII dapat menghasilkan keuntungan dari mulai dari 2014-2019, relatif besar melonjak tinggi, bahkan bisa dilihat di *slide 6*. Bahkan di Tahun 2019, keuntungannya lebih dari 1 triliun. Sementara Menteri Keuangan terbalik kita ini mengatakan segala sesuatunya itu berbicara tentang masalah pengaruh ekonomi, pengaruh perekonomian global yang turun, sehingga pertumbuhan perekonomian kita tidak bertumbuh, tapi disatu sisi PII bisa tumbuh ini. Ini saya pikir sebuah apresiasi, tapi disatu sisi kami juga minta penjelasan dari Pak Wahid Sutopo beserta jajaran, kok bisa begini bagaimana ceritanya Pak? Itu yang pertama.

Yang kedua, kami melihat di sini di *slide 11*, di sini dijelaskan manfaat dan dampak ekonomi proyek yang dijamin oleh PII, bahkan di situ ada dicatat PMN 8 triliun, PII dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pada 5 sektor infrastruktur berdampak pada penyerapan atau peningkatan

tenaga kerja 3,7 juta orang. Saya ingin tahu ini Pak Wahid. Mohon bantu dijelaskan, bagaimana detail perhitungan ini begitu lho Pak. Karena pemerintah saja untuk mengurangi atau menurunkan angka pengangguran yang 7 juta itu Pak, itu harus menggunakan Omnibus Law yang sekarang lagi ramai ingin diajukan ke DPR. Saya pikir kalau PII sudah bisa 3,7 juta, mengapa ada Omnibus Law kalau begini Pak. Saya ingin tahu detail perhitungannya seperti apa si. Itu yang kedua yang ingin saya tanyakan.

Yang terakhir yang saya coba tanyakan. Kita pahami rata-rata berbicara BUMN di bawah Kementerian Keuangan pasti akan berbicaranya tentang kewajiban *contingency* pemerintah. Kita ketahui *contingency* itu ada yang *direct* dan ada yang *indirect* kita pahami itu Pak. Sementara kalau PII berbicara di sini, berbicara tentang jaminan berarti *indirect* di sini bicararanya. Kewajiban ini timbulnya dimasa yang akan datang, bukan saat ini Pak. Saya tidak melihat langkah kerja atau *roadmap* dari PII seperti apa sih dengan penjaminan 210 triliun, langkah-langkah apa yang kita akan lakukan itu? Karena *contingency* ini, atau kewajiban yang timbul di masa yang akan datang ini kita tidak tahu seperti apa atau mungkin Pak Sutopo masih di sini, atau mungkin besok lusa Pak Sutopo sudah tidak di PII, atau mungkin besok, lusa Ibu Sri Mulyani tidak menjadi Menteri Keuangan lagi. Kita tidak tahu itu lho Pak. Sementara di satu sisi ada ketidakpastian juga. Nah kita belum melihat ini Pak, paparan ataupun seperti apa si manajemen resiko atau langkah-langkah yang dilakukan oleh PII.

Yang terakhir, mungkin saya ingin menggaris bawahi. PII fokusnya mau kemana sih sebetulnya itu? Kita belum melihat ini PII fokusnya mau kemana, karena mulai dari infrastruktur jalan, infrastruktur ini, semua dimakan oleh PII. Mau fokus kemana PII begitu Pak?

Demikian mungkin Pimpinan

Terima kasih.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Heri yang terhormat

Berikut Pak Mustofa.

Yang terhormat Mustofa silakan.

F-PDIP (H. MUSTOFA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pak Dirut PII, mohon maaf, tadi saya datang agak terlambat.

Saya sekilast belum bisa mengikuti saat paparan tadi, mencermati dari dokumen yang kita terima, bahwa PII ini didirikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2017. Ini dari penyertaan PMN. Saya menarik, karena PII sendiri juga

baru dengar, karena saya baru jadi Pak, izin saya Mustofa dari Fraksi PDIP, Dapil saya dari Kudus, Demak dan Jepara. Pasti ada kaitannya sekarang ini Tol Demak- Semarang.

Yang kedua yang juga ingin saya tanyakan juga nanti bagaimana untuk mengimbangi tenaga listrik yang di Batang. PII ini saya lihat itu adalah sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, luar biasanya apa, karena bisnisnya usus. Yang menjadi pertanyaan itu, dari nilai total proyek 210 triliun dengan nilai penjaminan 56 triliun, saya tidak melihat keberhasilan, kegagalan selama PII ini berdiri, pernah tidak ada kegagalan dari resiko-resiko. Resiko yang dijamin apa saja, karena saya lihat disini semuanya. Soal satu, kalau lihat di halaman 5, penjamin KPPU, penjaminan pinjaman langsung, penjaminan proyek pendamping transaksi, kapasitas building.

Kalau tadi sepintas dari Bapak-Ibu, rekan-rekan Komisi XI ini tadi sudah menanyakan itu. Terus yang dijamin itu apa saja dan yang pernah gagal dimana dan bagaimana penyelesaiannya. Padahal ini bicara soal penjaminan, pasti harus ada pihak ketiganya. Kepada siapa ini PII, jangan sampai hanya menghimpun dana, sudah tercapai bahwa pendapatan ini adalah pendapatan dari pada operasional.

Jadi Bapak-Ibu teman-teman lain sudah semua membuat apresiasi, tapi yang menjadi pertanyaan di dalam bathin saya ini, enak lagi sekali lho PII ini, bahwa yang dijamin barang jelas, resikonya juga masing-masing sudah jelas dan sekarang ini dari internal khusus saja, tadi kalau Pak Rudi Bangun tadi sudah menyampaikan, Bapak konsentrasi kemana-mana, ini hanya on out, in out saja.

Jadi harapan saya PII ini saya ingin melihat yang untuk dijamin ini apa saja, yang menjamin siapa saja, sehingga nanti jangan sampai salah Pak, karena saat ini trass di republik ini untuk kepercayaan, tentang lembaga penjaminan ini sudah mulai buyar, dengan pengalaman kejadian-kejadian diberbagai BUMN termasuk kasus Jiwasraya. Sayang sekali barangnya sudah bagus ketika nanti dibedah secara terang benderang, karena kalau dari sisi laporan ini semua sudah bagus. Intinya yang namanya sebuah usaha itu kan kalau sudah untung, ya baik, tidak ada baik, itu saja. Tetapi sekarang proses untuk penjaminannya.

Saya hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan, saya tidak ingin memberikan yang terlalu banyak, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Kalau tidak salah untuk Semarang-Demak ini 5,4 triliun ya Pak ya. Untuk Batang tidak tahu berapa itu. Saya tidak tahu siapa yang dapat bekerja saja, yang penting sarana itu sudah terlewati. Karena itu saya lihat kemungkinan besar resiko untuk Semarang-Demak itu adalah jauh lebih tinggi dibanding untuk Tol yang lain, karena itu adalah menyeberang ke membuat tambak untuk bendungan. Nah inilah saya ingin mendengar tolong nanti disampaikan, kalau tidak sempat secara langsung, secara tertulis juga tidak apa-apa. Untuk konsorsiumnya ini sapa siapa saja atau PII sudah memiliki sendiri atau bagaimana caranya, kalau asuransi ada reasuransinya, kalau PII ini kemana.

Baik, terima kasih Pak Dirut dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya ini akan baik. Jadi nanti kalau apa yang disampaikan Pak Rudi, siapa tahu bisa ikut konsultasi dengan PII.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, masih memberikan kesempatan kepada saya.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pak Mus terima kasih.
Selanjutnya Pak Hasby.
Silakan Pak Hasby.

F-P NASDEM (HASBY ANSHORY, S.E., M.M.):

Baik.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Bapak Wahid Sutopo Direktur Utama beserta Dewan Direksi yang saya hormati.**

Saya Hasby Anshory A-355 Dapil Jambi dari Fraksi Nasdem.

Saya minta penjelasan dari Pak Wahid, kalau saya baca di sekitar kinerja keuangan ini, ini perusahaan ini penjaminan, tapi ini pendapatan penjaminan ini modalnya dari mana Pak. Memang 2011 ada penerimaan, kemudian kosong, 2016 ada penerimaan lagi walaupun cukup kecil, ini modelnya seperti OJK ada memungut atau bagaimana ini modelnya, karena ada pendapatan penjaminan. Kemudian ada pendapatan *project development facility*. Ini pendapatan model mana ya kira-kira. Ini kita mohon penjelasan.

Kemudian kalau saya baca ikhtisar kinerja keuangan PT. PII ini, lebih banyak pengelolaan dana. Jadi kalau bisnis pengelolaan dana yang PMN, Bapak masuk ke PII, kemudian dikelola dana kemudian dapat keuntungan. Dan kalau saya lihat ini dari pendapatan usaha 1 triliun ini, mungkin cuma 50% dalam bentuk biaya, 50% baru nilai profit.

Kira-kira misalkan setelah yang tanya tadi, daerah misalkan mau membangun project infrastruktur, karena ini ada penyangkut penjaminan obligasi, ini bisa tidak PII ikut menjaminkan, misalkan pemerindah daerah dia pinjam uang BSBNI, kemudian dia bangun project, kemudian dia mau menjual obligasi juga, kira-kira ini masuk ke rananya PII atau tidak. Saya pikir, kalau saya baca ini, mungkin ini untuk supaya tidak langsung ke pemerintah penjaminannya.

Itu Ketua,
Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Restorasi.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Hasby yang terhormat.
Selanjutnya Pak Achmad Hatari.

F-PDIP (H. MUSTOFA):

Pak ketua ini memang paling baik sekali Pak, jadi langsung sebut nama diri sendiri.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Iya.

Pak Direktur dan semua jajaran,

Tolong ditampilkan *slide* Nomor 7. Tadi semuanya bicara soal *contingency* Pak ya atau garanti penjaminan. Ini proyek itu bermasalah, kenapa dijamin? Periode yang lalu kami sudah dua kali memeriksa ini proyek jalan Tol Manado-Bitung, permodalannya dari SMI, sampai sekarang palang memalang dari ruas jual menuju ke Bitung, kok dijamin oleh PII. Dicek dulu Pak. Jangan menjamin kemudian proyek-proyek yang tidak fleksibel, apalagi kasus tanah, hak ulayat. Coba PII coba cek ke sana Pak. Saya kemarin dari Manado. Jadi harus dicek dulu Pak, tapi itu Manado-Bitung menjadi catatan dari Komisi XI, kami tadi Pak Heri dan kami semua pernah cek ke sana. Jadi palang memalang terkait dengan barangkali kewajibannya belum diselesaikan, harga tanah.

Sementara yang sudah jalan Pak, yang disebelahnya itu target fisiknya sudah 80%, curah hujan dua hari. Ini artinya apa tadi Pak, memberikan *contingency*, memberikan *guarantee* permodalan, tapi hal-hal teknis seperti itu diabaikan. Orang ini tebing Pak, ini tebing kan harus dilihat Bapak-Ibu. Curah hujan berapa jam, semuanya sudah tutup jalan Pak, harus membuat lagi. Jadi kita memberikan dukungan Pak, tapi paling tidak fleksibel.

Kemudian tadi dari Pak Kamaruzaman. Kemarin dengan Menteri Bappenas, kami sudah menyuarakan keras, bahwa Komisi XI berharap dengan Menteri yang baru ini, dia bisa meminimize ketimpangan.

Kemudian yang halaman ketiga belas Pak, Pak Hatari masih ada satu pertanyaan lagi, halaman tiga belas. Nah, ada sekian perguruan tinggi, kontijensi apa ini, ini ada satu universitas di dapil saya, apa yang menjadi

perhatian, kapasitas building dalam bentuk apa, universitas khairun disitu Pak, apa yang di-*contingency*, apa yang diberikan perhatian. Kalau ditanya itu kapasitas *building*, dalam bentuk apa, riset, harus jelas Pak. Ini *sharing* saja Pak ya.

Ada lagi Pak, silakan Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M M.):

Terima kasih.

Perkenalkan Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Timur V, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Yang pertama dari penjelasan tadi saya lihat sepintas, belum dijelaskan sebetulnya *compression* dari pada PII ini kalau dibandingkan dengan perusahaan di luar. Terus kalau kita lihat, tadikan kalau tidak salah itu yang ini sudah hampir 10 tahun ya. Itu pertanyaan yang mendasar. Infrastruktur ini kan salah satunya PII ini dibangun untuk dibentuk untuk dapat menunjang pembiayaan infrastruktur di luar mekanisme APBN, dulu istilahnya Bappenas ada Penalaah, terus KPBU. Nah pertanyaannya kalau saya lihat tadi, itu kok kenapa baru dua BUMN IDTC dan PLN, yang lainnya kemana itu, karena menurut saya banyak proyek yang infrastruktur ini termasuk juga pelabuhan segala macam itu yang dibangun saat ini, tapi kenapa cuma dua ini yang menurut saya dibidang kalau PLN kita tahu semua ini. PLN itu problemnya ada di *cash flow* sebetulnya. Kalau IDTC kita lihat juga sebetulnya dia kalau dikatakan perusahaannya bagus, tidak bagus-bagus sekali itu ya. Memang kita pariwisata, tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan proyek-proyek pariwisata yang lain, itu tentu masih dipertanyakan. Pertanyaan saya, kenapa baru dua itu. mekanisme *screening*nya itu bagaimana sebetulnya. Karena kalau tidak salah ini penjaminan itu kan sifatnya dasarnya kalau menambah modal, berarti anda bisa mengangkat *gearing rasionya* bisa lebih besar. Nah tentu menjadi pertanyaan yang *eligible*, itu kriterianya bagaimana itu dan apa ini juga bisa berlaku untuk kerja sama dengan swasta, kembali kepada kriterianya ini ya.

Terus yang ketiga, kalau kita lihat, itu kan menerima PMN, kan penempatannya paling anda tempatkan di deposito, di Surat Utang Negara, segala macam ini. Nah pada saat menghitung resikonya, resiko itu terjadi pada saat apa. Karena di satu sisi kita lihat juga banyak proyek PLN, proyeknya ya, yang dijamin juga oleh negara, dalam pengertian, mana ada yang mau ambil PLN kalau tidak jamin oleh negara. Nah ini bagaimana menghitungnya supaya tidak *doubel guaranteed* begitu. Ini yang belum kita lihat. Jadi pada saat dimana resiko ini diambil dan bagaimana anda menghitung ini. Ini penting, karena kalau pentingnya dijelaskan sebetulnya bisnis modelnya dulu ini. Tentu kalau kita lihat bisnis model penjaminan oke, kalau ditambah modalnya, *gearing rasionya* naik, penjaminan yang dilakukan ada. Tapi pada saat menghitung resikonya, anda menempatkan dana PMN ini ditempatkan untuk investasi, itu returnnya tidak jauh-jauh dari bunga deposito maupun kombinasi disitu. Nah tapi kemudian, risk yang diambil itu bagaimana itu. Ini bagi saya sangat menarik, karena selama 10 tahun, saya lihat bagaimana supaya katakanlah yang dapat ini, yang *eligibel* itu memang proyek-proyeknya memang, selain ukuran-ukuran

tadi, itu memang boleh disebut sebagai memang proyek strategis nasional. Ini yang perlu. Saya tidak tahu, kenapa misalnya ya, karya-karya yang juga sekarang kesulitan *cash flow* itu ya, itu kenapa tidak memakai mekanisme ini, padahal tapi justru yang lainnya. Jadi seperti hal-hal itu yang menurut saya juga karya-karya ini perusahaan ini banyak menanggung resiko, karena ada proyek yang mungkin secara bank feasibilitynya masih dipertanyakan, yang saya kira cocok untuk model ini kan, tetapi kalau tidak masuk.

Saya kira ini Pimpinan.

Terima kasih.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Pak Andreas luar biasa.

Jadi Pak, kenapa kami bersuara ini tadi, Komisi XI punya cukup data pada periode yang lalu, terkait dengan PIP sebelum ke SMI. Itu kita mengecek banyak pinjaman dari daerah-daerah PIP itu ratusan miliar dan ternyata dia Bupati 10 tahun selesai masih ada *standing account* yang dalam jumlah yang cukup. 75 miliar bangun pasar, bangun jalan, 10 tahun lamanya turun *standingnya* masih 42 miliar. Itu hanya satu daerah dan banyak lagi daerah yang lain. Sementara Bupati yang menggantikan dia, bukan urusan rasa. Ini banyak seperti begitu. Jadi data itu ada di Komisi XI. Jadi itu kita hanya *sharing* saja dan perlu hati-hati. Studi kelayakan dulu cek Pak dan itu seperti itu.

Beberapa waktu yang lalu pada waktu acara OJK di Hotel Mulia, saya berbisik-bisik sama Gubernur Sulawesi Utara, bagaimana Pak Manado-Bitung, iya Pak Hatari, kacau ini di Manado, dipalang terus, apalagi curah hujan tinggi. Jadi ini hanya *sharing* Pak ya. Masih banyak.

Ada lagi yang mau menambah, kalau tidak, kita bersefakat bahwa rapat ini untuk tidak boleh lebih dari Jam 1, karena kami ada agenda rapat setelah ini. Begitu. Kalau tidak ada lagi Pak Sihar ya, semua kita lihat kesimpulan dulu biar bersepakatan sama-sama. Jadi ini sudah standar Pak, setelah rapat kerja begini, harus ada kesimpulan, artinya sesuatu yang sedang kita berfikir ke depan. Ini visionernya begitu.

Silakan dari Tenaga Ahli tayangkan ini kesimpulan.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN):

Izin Pimpinan.

Tanggapan dari PT. PII sendiri belum, dipersilakan.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Apa mau respon? Silakan Pak, *sorry*, ini cerdas sekali. Dia baru terpilih dari pengurus Golkar, jadi cukup cerdas. Terima kasih mengingatkan Pimpinan rapat.

Silakan Pak.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR-RI yang kami hormati.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih Bapak-Ibu sekalian, untuk tanggapan, arahan dan juga pertanyaan yang menurut kami sangat luar biasa Pak, saya sendiri belajar banyak Pak siang hari ini dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu. Tentunya kami mohon izin untuk menyiapkan jawaban yang komprehensif Pak, karena pertanyaan ini memerlukan tanggapan yang saya kira harus juga lengkap dan cermat untuk dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak-Ibu sekalian.

Secara ringkas ada beberapa hal yang barangkali dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memenuhi tenggat yang disiapkan oleh pimpinan. Nanti detailnya mohon izin pimpinan, kami akan susulkan dalam bentuk jawaban tertulis dengan data-data yang diperlukan, sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hal-hal yang disampaikan maupun ditanyakan.

Merunut secara umum, tadi diawali Ibu Linda Megawati, mengenai sejauh mana PII sudah melaksanakan mandat yang ditetapkan pada waktu pendirian PT. PII. Jadi terima kasih Ibu Linda untuk perhatian dan juga arahnya. Memang selama ini PII memang fokus pada apa yang menjadi mandat PT. PII, sehingga di tahun-tahun awal memang cukup sulit untuk bisa melaksanakan skema ini bu, ini kalau boleh dikatakan di empat tahun limat pertama itu seperti sama sekali tidak ada proyek dapat masuk skema penjaminan. Jadi baru di Tahun 2014 mulai ada. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat melakukan sosialisasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebelum skema tersebut bisa mulai dilaksanakan.

Namun syukur *alhamdulillah* ini sejak Tahun 2014, 2015 skema yang dimandatkan pada PT. PII ini sudah mendapatkan sambutan yang baik, baik dari Kementerian Lembaga di Pusat, kemudian juga Pemerintah Daerah dan juga BUMN, sehingga pada saat ini sudah ada 22 proyek yang bisa menggunakan skema yang digunakan oleh PT. PII.

Terima kasih juga untuk perhatian Ibu mengenai penghargaan yang diperoleh PT. PII mengenai *The Asia Risk Award*. Betul Ibu itu merupakan suatu beban pada kami karena kami juga berarti tidak hanya membawah nama PII, tapi juga dari sisi skema yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia, bagaimana kita bisa mempertahankan pencapaian tersebut di depan. Jadi dari sisi kami sendiri baik dalam skala *interprise risk manajemen*, kami tengah melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan dan juga mencari terobosan-terobosan baru yang dipandang ikut mengembangkan tiga aspek tadi, baik yang sifatnya publik inisiatif, kemudian publik risk, maupun juga *risk indicator*.

Diantaranya mungkin yang bisa kami share adalah kami menyiapkan platform yang sifatnya digital Ibu Linda. Jadi dengan platform ini diharapkan akan lebih banyak pihak lagi yang dapat ikut serta berpartisipasi dalam

kegiatan PII, walaupun secara fisik mereka tidak harus berada di lokasi yang ditetapkan. Itu salah satu yang barangkali nantinya bisa membantu skema untuk melakukan *knowledge management*, melakukan *elektronik learning* dan juga skema-skema lainnya. Bahkan juga untuk proses *screening* yang selama ini mungkin masih dilakukan secara fisik tatap muka seperti ini. Kami sudah menyiapkan *platformnya* bu, sehingga nanti secara digital, itu para pihak bisa melakukan proses *screening* tersebut. Sehingga rekan-rekan dari daerah-daerah tidak harus mengatur pertemuan baik di daerah maupun di pusat ini untuk dapat melakukan proses tersebut. Diharapkan nanti bisa membantu kami semua di atas.

Izin kalau boleh lanjut, Pak Sihar.

Pak Sihar, pertama kami menyampaikanklarifikasi, untuk saldo laba itu Pak, yang 3 triliun itu sifatnya akumulasi Pak ya, sejak PT. PII berdiri sampai dengan 31 Desember 2019.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Jadi belum ada deviden?

Izin Pimpinan.

Belum ada deviden yang *fee out*.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Sudah Pak. Deviden sudah dibayarkan sejak Tahun 2017.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Kalau boleh tahu berapa persen deviden *fee out* rasionya?

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Jadi meningkat terus Pak dari 20% sampai 33% Pak pertahun, itu sudah dilakukan pembayaran deviden.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Saya kira itu nanti.

Pimpinan, pimpinan izin pimpinan.

Itulah yang mungkin patut di kita diskusikan ini, tujuannya utamanya apa, untuk menghasilkan deviden atau untuk membantu pembiayaan infrastruktur. Ini nanti tinggal kantong kiri, kantong kanan saja, PMN dimasukan

lagi ya kan, terus membayar deviden. Nanti perlu kita nanti teman-teman di Panja PMN mungkin perlu pendalaman lebih lanjut.

Terima kasih.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Terima kasih Pak Andreas.

Kami tentunya sebagai manajemen mengikuti arahan Pak, yang diberikan dari pemegang saham. Ini sebagaimana yang ditetapkan dalam di rencana jangka panjang maupun di rencana kerja anggaran perusahaan setiap tahun. Jadi semua apa yang disampaikan kami usahakan untuk dapat dipenuhi.

F-PDIP (H. MUSTHOFA):

Izin Pimpinan sedikit, Pak Dirut.

Supaya nanti walaupun dibatasi Jam 1 tidak apa-apa ini, sedikit saja. Ini PII di bawah Kementerian Keuangan, koordinasinya dengan BUMN. Jangan sampai nanti seperti ASTRA Pak, antara TOYOTA dengan ISUZU, laku TOYOTA jalan, laku ISUZU jalan. Nah koordinasi yang paling efektif yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang sebelumnya ini apa. Dan saya terus terang saja, ingin ada penegasan tadi yang saya tanyakan mengenai profesi yang dijamin oleh PT. PII.

Terima kasih Pak Dirut.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Terima kasih Pak Musthofa.

Kami akan jelaskan secara rinci Pak, karena memang sudah ada kerangka regulasinya Pak yang diatur di dalam Perpres 38 Tahun 2015, maupun juga di Perpres 78 Tahun 2010 Pak, mengenai skema regulasinya.

Kalau mungkin belum lengkap ini Pak, kita menjawab beberapa detailnya nanti kami sampaikan secara tertulis. Jadi mohon izin Pak Sihar, sekalian nanti belum bisa ditanggapi pada saat ini.

F-PDIP (SIHAR SITORUS):

Izin Pimpinan.

Interupsi sedikit.

Pak Sutopo, kalau boleh dalam jawaban tertulis, mungkin ditambahkan juga ketika asumsikanlah bahwa dalam PPP ini, porsi pemerintah PPP ini, porsi Pemerintah 30%, Swasta 70%. Misalnya begitu ya. Terus pertanyaan pertamanya adalah siapa si *running the show*, ketika porisnya seperti itu. Begitu

ya. Kemudian apabila terjadi suatu skenario di luar rencana semula, itu *dispute* resolusinya seperti apa.

Terima kasih Pak.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Baik Pak kami catat.

Secara singkat Pak, jadi dasar dari pada skema PPP atau KPBU adalah alokasi resiko Pak. Jadi memang ini perbedaan dengan KPBU dengan skema bisnis atau bisnis government lainnya, di KPBU ini alokasi resiko antara Pemerintah dengan Badan Usaha itu ditetapkan secara rinci Pak diawal. Nah itu pula yang menjadi acuan, nanti pada waktu terjadinya hal yang tidak terduga Pak, karena masing-masing pihak itu sudah mempunyai ketetapan apa yang menjadi alokasi resiko mereka.

Pada umumnya menjadi resiko dari pada Badan Usaha, itu adalah aspek desain Pak, kemudian *finance*, kemudian, *maintenance*, *operatioan dan transfer*. Sedangkan kalau dari pemerintah terkait pada aspek penyediaan lahan, kemudian juga dari aspek regulasi, serta perizinan. Nah disini yang menjadi pembagian tugas, tadi kalau Bapak sampaikan, sebetulnya relatif *finance* pembiayaan pun jadi beban Badan Usaha Pak, jadi tidak ada beban pemerintah atau pembiayaan. Pada umumnya untuk kecuali untuk proyek-proyek yang membutuhkan dukungan Pak. Kalau pada umumnya proyek, itu menjadi tugas dari pada Badan Usaha.

Jadi mungkin itu saja kami sampaikan dalam jawaban tertulis kami kepada Bapak-Ibu.

Kemudian juga lanjut tadi dengan Pak Hidayatullah. Ini yang mungkin kami perhatikan Pak, dari sisi arahan-arahan Bapak. Memang betul Pak tidak semua sukses story Pak dalam PPP ini, terus terang yang menjadi kendala umumnya bahkan sebelum Pak, terjadinya kerja sama Pak. Jadi kalau Bapak tanyakan cerita kegagalan, tidak berhasil memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dapat berlanjut seperti PPP Pak. Itu ada cukup banyak Pak proyek-proyeknya. Jadi mungkin..

F-PDIP (H. MUSTOFA):

Izin Pak.

Berapa nilainya Pak kira-kira. Nilainya berapa?

Saya Musthofa Pak, dan saya tidak kemana-mana Pak, saya tunggu ini sampai selesai. Untuk itu bentuk rasa hormat maksud saya.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Baik Pak.

Terima kasih Pak Musthofa.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Baik Pak Direktur, saya pikir cukup ya, waktu tinggal 4 menit lagi. Tayangkan kesimpulan.

Silakan. Nanti dikoreksi sama-sama ya dengan PII. Sebelah kiri lagi. Ia Pak Dirut dengan jajaran, teman-teman anggota Komisi XI yang saya hormati.

Rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
.....(suara terputus)..... Penjaminan Infrastruktru Indonesia Masa
Persidangan II Tahun 2019-2020, Hari ini Senin, 17 Februari 2020.

1. *Komisi XI DPR-RI telah menerima laporan Kinerja PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Laporan tersebut menjadi bahan Komisi XI DPR-RI dalam melaksanakan tugas, fungsi pengawasan.*

Bagaimana Bapak setuju?

Tadi kan perannya, peran *budgeting*, legislasi dan pengawasan.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Setuju Pimpinan.

Terima kasih.

Hanya satu catatan. Jadi laporan kami hari, itu berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit ya Pak, karena memang proses auditnya masih berlangsung

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Sudah kita tangkap tadi. Ini kita juga belum mengecek bagaimana deviden dan lain-lain, tapi kita masih empat setengah tahun lagi akan berdiskusi terus. Jadi jangan dihabiskan pada hari ini.

Jadi poin yang satu kita setuju ya.

Pak Sihar?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kedua,

2. *Komisi XI DPR-RI meminta kepada PT. PII untuk menyampaikan jawaban tertulis maksimal 7 hari kerja, atas semua pertanyaan yang kita diskusikan tadi pada Komisi XI.*

Ini bahasa standar yang kita sepakati selama 6 Tahun 7 hari kerja.

Setuju Pak ya?

(RAPAT : SETUJU)

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Pimpinan.

Mungkin sedikit masukan. Hanya mengenai penulisan nama Pimpinan, karena dituliskan sebagai PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai *by phone*.

Terima kasih Pimpinan.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Boleh-boleh.

Mending kita setuju.

Tadi kesimpulan, sebelum rapat kita akhiri, ada closing statement dari Pak Direktur. Silakan Pak.

DIRUT PT. PII (WAHID SUTOPO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR-RI

Mewakili seluruh jajaran PT. PII, Direksi dan seluruh jajaran PT. PII. Kami menyampaikan terima kasih atas segala kesempatan, arahan, bimbingan yang telah diberikan oleh Komisi XI dan kami mohon arahan, bimbingan serta kerja sama tersebut dalam berlangsung di masing-masing akan datang. Kami akan menyiapkan apa yang diperlukan informasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi XI di DPR-RI.

Sekali lagi terima kasih.

WAKATUA (Dr. ACHMAD HATARI, SE., M. Si/F-P. NASDEM):

Terima kasih Pak Direktur.

Yang terakhir, izinkan saya sebagai Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi dan teman-teman anggota Komisi XI yang saya hormati, kami menyampaikan rasa hormat. Terima kasih dan tulus kepada PII, kepada Direktur beserta jajaran, partisipasi kita berdiskusi pada hari luar biasa.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan Yanga Maha Esa, kita rapat pada hari ini dinyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL. 12.00 WIB)

Jakarta, 17 Februari 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001